



Perwakilan

Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks
Vol. 1 (2023), pp. 39-51

Pengaruh Nasionalisme Soekarno Terhadap Ketatanegaraan dan Politik Islam di Indonesia

Ferdi Yufriadi ^{a,b,*}, Donna Ramadhan Fitri ^{a,b}, Abdullah A. Afifi ^b

^a UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi

^b IDRIS Darulfunun Institute, Payakumbuh

Tanggal terbit: 20 November 2023

Abstract:

This article analyses the influence of Soekarno's secular nationalism in forming the Indonesian state. Soekarno, as one of Indonesia's proclaimers of independence and its first president, had a key role in shaping the new country's national identity and political direction. This article describes how Soekarno's secular views influenced the struggle for independence and the formation of the Indonesian state and how this vision of secular nationalism was reflected in various policies and programs of his government. In his writings, Soekarno emphasized the importance of Pancasila as the basis of an inclusive state ideology and reflected the spirit of secular nationalism. Soekarno's vision of secular nationalism was also reflected in his efforts to advance social and economic equality among the Indonesians and promote national independence through industrialization and the nationalization of vital assets. However, this article also highlights the controversy and criticism that Soekarno faced regarding his approach, which tended to be authoritarian in dealing with political opposition and resistance from certain religious groups. At the end of his reign, Sukarno's secular nationalist views began to be challenged by various groups who emphasized religious identity in political discourse. Overall, this article presents a comprehensive picture of the influence of Soekarno's secular nationalism in forming the Indonesian state. Although some aspects of his political approach are controversial, the legacy of Soekarno's secular nationalism remains an important part of Indonesia's national identity. It is relevant in facing the nation's future challenges.

Keywords: Soekarno, nationalism, statecraft, fiqh siyasah, political Islam

*Korespondensi: ferdiyufriadi@darulfunun.id

Abstraksi:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nasionalisme sekuler yang dimiliki oleh Soekarno dalam proses pembentukan negara Indonesia. Soekarno, sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama, memiliki peran kunci dalam membentuk identitas nasional dan arah politik negara baru. Tulisan ini menggambarkan bagaimana pandangan sekuler Soekarno mempengaruhi perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia serta bagaimana visi nasionalisme sekuler tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintahannya. Dalam tulisannya, Soekarno menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang inklusif dan mencerminkan semangat nasionalisme sekuler. Visi Soekarno tentang nasionalisme sekuler ini juga tercermin dalam upayanya untuk memajukan persamaan sosial dan ekonomi di antara rakyat Indonesia serta mempromosikan kemandirian bangsa melalui industrialisasi dan nasionalisasi aset-aset vital. Namun, tulisan ini juga menyoroti kontroversi dan kritik yang dihadapi Soekarno terkait pendekatannya yang cenderung otoriter dalam menghadapi oposisi politik dan perlawanan dari kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Pada akhir masa pemerintahannya, pandangan nasionalisme sekuler Soekarno mulai mendapat tantangan dari berbagai kelompok yang lebih menekankan identitas agama dalam wacana politik. Secara keseluruhan, tulisan ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang pengaruh nasionalisme sekuler Soekarno dalam pembentukan negara Indonesia. Meskipun beberapa aspek pendekatan politiknya kontroversial, warisan nasionalisme sekuler Soekarno tetap menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia dan relevan dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa.

Kata kunci: Soekarno, nasionalisme, tata negara, fikih siyasah, politik Islam

1. Pendahuluan

Nasionalisme yang muncul dan bertumbuh kembang di Indonesia tidaklah sama dengan nasionalisme yang berkembang di Eropa. Nasionalisme di Eropa muncul dari upaya industrialisasi besar-besaran dari masyarakat agraris. Perubahan tersebut ini menciptakan masyarakat kelas-kelas di masyarakat, antara tuan tanah dan pekerja, kelas borjuis (atas) dan menengah, dari menuntut persamaan hak dengan kelas borjuis inilah masyarakat Eropa mulai mengembangkan konsep nasionalisme. Semangat nasionalisme ini menular ke Indonesia dan Asia yang pada umumnya adalah respon dari kegiatan kolonialisme yang dilakukan oleh Eropa, dari pencarian bahan baku untuk industri mereka (Sjamsuddin, 1998).

Hingga saat ini, nasionalisme modern yang tumbuh di Indonesia masih terus berkembang. Islam sebagai agama bahkan syariat Islam sudah menjadi budaya adalah hal yang menyatu bagi orang Indonesia. Nasionalisme di Indonesia tidak hanya untuk berkaitan dengan independensi dari kolonial Belanda, tetapi juga dengan dengan Tionghoa, yang pada saat itu pada umumnya dikenal sebagai tuan tanah atau golongan Borjuis. Salah satu alasan berdirinya Sarekat Dagang Islam (1911, kemudian disebut Sarekat Islam) pada awalnya ditujukan untuk menyaingi monopoli bisnis Tionghoa di kota solo (Nur, 1987). Kita juga memperhatikan Budi

Utomo (1908) dan Indische Partij (Indische Partij) atau Partai Hindia pada tahun 1913. Di antara orang-orang yang netral secara agama (meskipun mereka Muslim), mereka sebetulnya juga menentang kepemimpinan Islam atau Islam masuk dalam ranah politik. Perdebatan ini terus meruncing dan berkembang mematenkan konsep tentang agama dan politik (Afifi & Abbas, 2023a). Alimin (m. 1964) dari Sarekat Islam pada tahun 1916 mendesak agar organisasi tersebut diubah menjadi Sarekat Idjo (dengan demikian membela SI), sehingga tidak menggunakan Islam sebagai dasar, tujuan ataupun elemennya. Partai Nasional Indonesia (1901-1970) di bawah kepemimpinan Sukarno kemudian muncul sebagai alternatif. Pada tahun 1930-an, Partai Indonesia (Partindo), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Partai Indonesia Raya (Parindra) terus melakukan tantangan kepada partai Islam. Akibatnya, perselisihan muncul dalam komunitas Muslim, yang awalnya hanya dengan komunis (masih Muslim), kemudian melebar berkonflik dengan nasionalis yang sekuler, yang sebagiannya besar anggotanya adalah Muslim.

Ada empat wilayah yang tampaknya tidak saling berkaitan satu sama lain, apalagi di tahun-tahun awal perkembangannya dapat dikatakan sebagai tempat lahirnya gerakan Islam modern di Indonesia. Daerah-daerah tersebut adalah *Minangkabau*, dengan pelopornya adalah Haji Abdullah Ahmad (1878-1933) dengan Adabiah, Haji Abdul Karim

Amrullah (1879-1945), Syekh Abbas Abdullah (1883-1957), dan Syekh Ibrahim Musa Parabek dengan Sumatera Thawalib, dan kemudian Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947) dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Abbas, 2020). Kemudian *Jakarta* yang awalnya diorganisir oleh Jamiat Khair dan Al-Irsyad, yang pada awalnya adalah komunitas orang-orang keturunan Arab di daerah Tanah Abang yang kemudian berkembang menjadi lembaga sosial dan pendidikan (Hasyim & Haryono, 2019). Daerah berikutnya adalah wilayah Jawa bagian tengah, kesultanan *Yogyakarta* dan *Surakarta*, yang berdiri Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan (1869-1923) dan Sarekat Dagang Islam (1911; kemudian Sarekat Islam 1912) oleh Kiai Haji Samanhudi (1868-1956) (1912); dan daerah *Priangan*, Jawa bagian barat, meskipun lebih lambat dari daerah lain, tetapi Ahmad Hassan (1887-1957) sebagai guru utama adalah termasuk yang dikenal oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam modern di daerah lain (Abbas & Afifi, 2022; Nur, 1987). Mengenai masyarakat keturunan Arab ini, diperlukan beberapa penjelasan tambahan. Meskipun mereka melebur dan mudah menyatu dengan masyarakat umum di Indonesia karena kesamaan latar belakang, apalagi karena sebagian orang tuanya yang berasal dari Indonesia. Sebagai pemodal yang diakui oleh kolonial Belanda, beberapa dari mereka merasa suara keturunan Arab ini masih signifikan didengar oleh pemerintah kolonial, sehingga mereka membentuk partai khusus pada tahun 1934, yakni Partai Arab Indonesia. Partai yang ditegaskan oleh A.R. Baswedan (1908-1986) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah kampung halaman mereka (Nur, 1987).

Jika komunis pada umumnya identik anti-agama, bahkan anti-Islam. Sedangkan kelompok nasionalis yang mengambil posisi netral agama ingin membatasi agama pada satu bidang saja (sekuler) dan menunjukkan "keterbelakangan" ajaran Islam karena mereka menganggapnya sebagai poligami (sering disebut poligami). Kelompok nasionalis ini kerap mempercantik era Hindu di Indonesia, menyebut Gokhale, Tilak, dan Tagore di India, bahkan sesumbar diumpamakan Mekah dengan Digul. Dalam perbandingan ini, juga diungkapkan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk haji. Adapun komunis, mereka menekankan kekejaman kapitalis kepada orang miskin, terkadang membandingkan doktrin kapitalis ini dengan Muslim kaya yang mencoba menggunakan peralatan kapitalis, yaitu kapal-kapal perusahaan asing ke Mekah.

Ide Sukarno tentang mempersatukan nasionalisme, Islam dan Marxisme pada tahun 1926 mencerminkan pandangan terakhir ini. Ditantang oleh ide-ide ini, walaupun mereka pada awalnya ditantang oleh pemikiran Barat sendiri. Barat menguasai dunia Muslim. Mereka mempraktikkan agama di seluruh dunia dan membela diri dan agama mereka dengan bersungguh-sungguh mempelajari ajaran-ajaran Islam, sehingga dengan jelas dapat mengkritisi penerapan Islam dalam ajaran Islam di zaman modern. Pada tahun 1911-an, Haji Agus Salim (1884-1954) dan sampai batas tertentu Haji Oemar Said Tjokroaminoto (Haji Oemar Said Tjokroaminoto, 1882-1934) pada awalnya atas dasar penolakan Islam juga mengemukakan idenya sendiri, sehingga menolak netral secara politis, menjadi nasionalis ataupun komunis. Sedangkan pergerakan Islam pada saat itu dianggap sudah ketinggalan jaman (Afifi & Abbas, 2020; Azra, 2004; Fitri, Afifi, & Abbas, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memahami bahwa nasionalisme Indonesia adalah Nasionalisme Pancasila yang mengajarkan bahwa warga negara Indonesia harus memiliki semangat kebangsaan yang tinggi dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas perbedaan yang ada. Pancasila menjadi dasar ideologis negara yang mengikat semua warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi landasan dalam membentuk negara dan pemerintahan, serta mengarahkan kebijakan politik dan kehidupan sosial. Nasionalisme Pancasila berfungsi sebagai pegangan dan panduan bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun negara yang adil, berdaulat, dan berkepribadian bangsa. Namun, meskipun Pancasila menjadi dasar negara, pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut tetap menghadapi tantangan dalam realitas sosial dan politik Indonesia. Beberapa isu yang sering muncul adalah adanya perbedaan pandangan dan pemahaman tentang Pancasila, upaya kelompok-kelompok radikal untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, serta beragam perbedaan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesatuan bangsa (Jumanda, Yufriadi, Ramadhan Fitri, & Refliandi, 2023; Kurniawan & Afifi, 2023; Subhi, 2019). Selain itu isu pemahaman tentang adanya Pancasila dan hukum positif di Indonesia adalah salah satu upaya yang terus menerus dari upaya besar membangun legitimasi kedaulatan negara yang mengayomi seluruh aturan-aturan hukum yang ada sebelumnya, baik hukum kolonial, hukum agama maupun hukum adat istiadat lokal yang

beragam (Arifin & Abbas, 2007). Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat nasionalisme Pancasila melalui pendidikan literasi, dialog, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat penting guna memastikan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri (Afifi & Abbas, 2023b; Munir et al., 2020). Artikel menggunakan analisis literatur dan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder seperti tulisan, dan dokumen-dokumen penting tentang Soekarno (Abbas, 2010; Afifi, 2023). Melalui pendekatan ini, penulis menjelaskan bagaimana Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme sekuler harus menjadi pijakan untuk mencapai persatuan di antara beragam kelompok etnis dan agama di Indonesia.

2. Sejarah Nasionalisme

Sejarah nasionalisme dimulai pada seperempat terakhir abad ke-18, ketika terjadi perang kemerdekaan antara Polandia dan Amerika Serikat dan Napoleon di Prusia, Rusia, dan Spanyol dimulai. Menurut pandangan ini, nasionalisme lahir dari revolusi yang berlangsung selama empat puluh tahun ini. Selain itu, dari tahun 1810-an hingga 1820-an, nasionalisme tersendat di seluruh Eropa (lagi-lagi) ke Serbia, Yunani dan Polandia, dan elit Kreol di Amerika Latin. Acara ini juga disebut "pembibitan rakyat" (*people's spring*). Prestasi utama yang dihasilkannya adalah penyatuan Jerman dan Italia dengan bantuan Prusia dan Piedmont, dan kebangkitan Hungaria di Kekaisaran Habsburg. Pada paruh kedua abad ke-19, Eropa Timur dan Eropa Utara memicu gelombang kedua nasionalisme-Cekoslowakia, Slovakia, Rumania, Bulgaria, Lituania, Finlandia, Norwegia, Yahudi dan beberapa nasionalisme di luar Eropa, seperti Miji Jepang, India, Armenia Dan Mesir (Smith, 2002).

Kemudian ini diikuti dengan munculnya berbagai nasionalisme kebangsaan di Asia dalam beberapa dekade pertama abad ke-20, seperti di Turki, Arab, Persia, Burma, Jawa, Filipina, Vietnam dan China, serta nasionalisme bangsa Arab. Nasionalisme pertama di Afrika adalah di Nigeria, Ghana dan Afrika Selatan. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, sulit untuk menemukan ruang lingkup global yang bebas dari gerakan nasionalis. Pada periode yang sama, terjadi klimaks nasionalisme di Eropa, kemudian Nazisme mencapai klimaksnya, dan pembunuhan massal terjadi pada Perang Dunia II, diikuti oleh nasionalisme di Asia dan Afrika dalam bentuk "gerakan kemerdekaan" anti kolonial.

Sebetulnya sulit untuk menarik kesimpulan tentang cerita nasionalisme ini, bagaimana muncul dan sejauh mana ia berakumulasi menumbangkan kekuasaan-kekuasaan monarki dan feodal. Ketika gagasan "habisnya kekuasaan" muncul, nasionalisme kembali muncul di Catalonia dan Uzcadi, Korsika dan Brittany, Flanders, Skotlandia dan Wales, dan Quebec pada tahun 1960-an dan 1970-an. Juga munculnya gerakan otonomi etnis di Cina. Pada 1980-an, ketika Perestroika dan Glasnost menganjurkan nasionalisme di negara-negara Republik di Uni Soviet pada 1988, mereka bangkit kembali, dan kemudian memainkan peran dalam menggulingkan Uni Soviet pada 1991, dan membentuk negara-negara pecahan atas nama nasionalisme. Dalam suasana penuh harapan ini, kita telah menyaksikan perguliran hingga tragedi terbentuknya bangsa-bangsa baru. Nasionalisme juga terjadi di anak benua India, Timur Tengah dan Semenanjung Afrika, Rwanda. Hingga daerah Kaukasus juga mengalami demam nasionalisme dalam dekade terakhir abad ke-20, terutama dalam perang Yugoslavia dan setelahnya.

2.1. Setelah perang Dunia pertama

Konferensi Perdamaian Wina pada tahun 1814 mencoba menahan kekuatan revolusioner yang diakibatkan oleh nasionalisme. Namun, sepanjang abad ke-19, kekuatan ini terus berkembang di setiap Kawasan dan membentuk negara-negara baru. Baru kemudian terjadi perjanjian damai tahun 1919 yang berarti bahwa seluruh tatanan dan sistem yang didirikan di Wina dihancurkan. Di seluruh Eropa Tengah dan Eropa Tengah dan Timur, negara-negara dan bangsa-bangsa baru telah muncul, dan negara-bangsa lama yang muncul pada abad ke-19 telah diperluas berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri (Kohns, 1984).

Setelah Perang Dunia II, nasionalisme tidak lagi kuat bergaung di Barat. Keinginan untuk kerja sama supra-nasional kemudian berkembang pesat. Dibandingkan dengan nasionalisme, Uni Eropa Barat dan Komunitas Atlantik lebih berharap dalam memastikan perdamaian dan memperluas kebebasan individu. Pada saat yang sama, di Timur, komunisme tidak pernah menekankan kedaulatan nasional seperti sekarang. Nasionalisme di Timur menjadi kekuatan yang paling kuat dan khusus. Ketika menyebar ke Eropa Timur dan kemudian ke Asia, tradisi negara-negara ini berbeda dengan Barat, dan seringkali bertentangan dengan cara hidup Barat. Nasionalisme telah menyebabkan masyarakat tertutup di mana nilai individu menjadi

kurang. dari semua negara. Kekuasaan dan kekuasaan. Nasionalisme cenderung bertindak cepat dan menggunakan kekerasan untuk membuat nasionalisme tidak jauh berbeda dan rentan terhadap pengaruh komunisme.

2.2. Nasionalisme di Timur Tengah

Perang Dunia Pertama yang kemudian menghasilkan resolusi dan melakukan pembagian wilayah Kekaisaran Ottoman (Turki). Di atas reruntuhan Yunani, atas nama nasionalisme ingin membangun kembali kegemilangan Yunani kuno dan Kekaisaran Bizantium. Tentara Yunani Barat (Anatolia) adalah tempat di mana kota Yunani kuno yang sejarahnya banyak dikenal. Meskipun populasinya besar, mereka semua adalah Kristen Ortodoks dan mereka pada umumnya adalah bangsa yang makmur. Invasi ke pusat kekuasaan Turki Usmani ini menciptakan semangat nasionalis di kalangan petani Turki. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal yang kemudian dikenal dengan nama Atatürk (1881-1938), mereka berhasil mengalahkan tentara Yunani. Kemenangan ini kemudian memastikan kemerdekaan bangsa dan kesetaraan status Turki, yang sudah lama tidak saling kenal. Salah satu ketentuan dalam "Perjanjian Damai Turki-Yunani" menetapkan bahwa kedua pihak harus secara paksa bertukar penduduk (Kohns, 1984).

Jika Yunani seorang Muslim, maka Anda harus pindah ke Turki; jika Turki adalah orang Yunani, maka denominasi Ortodoks (lebih besar, lebih besar, lebih makmur) akan dipindahkan ke Yunani. Terlepas dari kenangan menyakitkan perang dan pengusiran pemerintah Yunani dan Turki, mereka berhasil menjalin hubungan persahabatan antara kedua negara dan memperkuat kerja sama di bidang politik dan militer. Ini karena kedua pemerintah telah sepenuhnya meninggalkan cita-cita ekspansi regional mereka dan semua ambisi untuk membangun kembali kerajaan kuno. Tak kalah pentingnya adalah transformasi bangsa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Mengubah struktur agama dari model abad pertengahan, kemudian mengubah Turki menjadi republik dunia modern, informasi dasar yang terintegrasi, dan demokratisasi kehidupan Turki.

2.3. Nasionalisme di India

Hubungan dengan dunia Barat yang dianggap modern, peradaban dan masyarakat Asia kemudian dianalogikan sedang dibangun kembali, dan menyebabkan kekuatan-kekuatan baru muncul. Itu adalah pengaruh kemajuan Barat yang mendesak

pada peremajaan bangsa-bangsa di belahan bumi lainnya, sedangkan di Barat sendiri sudah hampir berakhir belum lama ini (Kohns, 1984). Dalam proses sejarah ini, Inggris berada di garis depan. Peradaban bebasnya mempengaruhi perkembangan kemerdekaan konstitusional Eropa, dan membawa semangat dan jiwa baru di Asia dan kemudian di Afrika.

Nasionalisme di belahan Timur Asia sudah mulai bangkit di India, dengan Partai Majelis Nasional India yang lahir pada tahun 1885. Pada awalnya Sir Said Ahmad Khan, yang memelopori dan mendukung ide-ide nasionalis, kemudian menjauh dari gerakan ini. Menurut dia, kampanye yang dilancarkan Partai Kongres hanya akan merugikan umat Islam. Karena itu, dia menasihati umat Islam untuk tidak mencampuri agitasi politik Partai Kongres. Dari pemikiran politik yang dikemukakan oleh Sir Said Ahmed Khan, terlihat jelas bahwa cita-cita perjuangan antara kelompok Islam dan nasionalis di Partai Kongres sudah mulai muncul. Kelompok nasionalis berharap Muslim dan Hindu bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan India. Namun, kelompok Islam ingin berdiri sendiri di negara yang terpisah dari Hindu karena mereka takut minoritas Muslim akan didorong menjadi mayoritas Hindu. Cita-cita inilah yang menjadi alasan mengapa akhirnya lahir negara Pakistan di kemudian hari.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua kelompok Islam setuju dengan cita-cita sebuah negara Islam dan setuju dengan cita-cita di atas. Masih banyak kelompok-kelompok Islam di India yang masih memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Misalnya, dalam pidatonya, Ubaidullah Sindi mendorong umat Islam untuk membantu Partai Nasional India, agar tidak tertipu oleh keyakinan bahwa umat Islam sebagai minoritas akan menindas kehidupan masyarakat India, dan masalah mayoritas dan minoritas tidak akan muncul. Bahwa mereka atas nama nasionalisme akan diperlakukan sama.

3. Politik Islam

3.1. Konsep Fiqh Siyasah

Perbincangan tentang nasionalisme dalam tubuh umat Islam sesungguhnya diawali oleh gagasan pan-Islamisme yang telah berkembang sebelumnya. Gagasan ini dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dalam analisis mereka, penyebab keruntuhan Islam dan kaum muslimin bukanlah kelemahan atau kekurangan internal kaum muslimin, melainkan adanya imperialisme agresif yang dilancarkan oleh Kristen Eropa, yang

bertujuan untuk memperbudak kaum Muslimin dan menghancurkan Islam. Al-Tahtawi, seorang teoritis nasionalisme Arab yang paling berpengaruh menegaskan bahwa patriotisme adalah sumber kemajuan dan kekuatan, suatu sarana untuk mengatasi kesenjangan antara Islam dan Eropa.

Dalam khazanah intelektual dan pergerakan Islam juga muncul seorang pemikir Muslim dari Mesir yang bernama Hasal al-Banna, yang secara komprehensif dan sistematis menggagas konsep nasionalisme yang disinergiskan dengan konsep kebangkitan Islam global. Kebangkitan itu dapat dilakukan melalui kekuatan-kekuatan nasional yang telah dijiwai spirit dan falsafah Islam. Pembaharuan-pembaharuan gerakan Hasan al-Banna dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan dan realitas politik yang ada. Oleh karena itu, perwujudan konsep nasionalismenya pun mengambil bentuk yang plural dan general dengan penekanan kesamaan visi, yaitu kebangkitan Islam global. Asumsi ini serupa dengan pandangan Islam dalam Al-Qur'an (49:13):

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu benbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, dan Maha teliti.”

Selain itu, ada pepatah di kalangan umat Islam yang disebut *“hubbul wathon minal iman”*, yang berarti *“cinta tanah air adalah bagian dari iman”*. Al-Quran (13:11) menekankan kecintaan terhadap tanah air ini dan menuntut masyarakat untuk melakukan perubahan:

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

Menurut Islam, ummah (masyarakat) yang arti dasarnya adalah kumpulan atau kumpulan orang-orang yang disatukan oleh ikatan agama. Agama di dalamnya merupakan dasar dari hubungan sosial, hukum, politik, ekonomi, dan etika di antara mereka (Abbas, 1981; Afifi, 2021; Dault, 2005). Dalam periode sejarah tidak hanya ada satu bangsa, tetapi juga banyak bangsa atau suku bangsa yang berarti banyak agama yang dimaknai sebagai kondisi yang diinginkan Tuhan dalam Al-Quran. Hubungan antara Islam dan kebangsaan dapat dijelaskan dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif *unified pluralism*, bahwa Islam memiliki hubungan positif dengan nasionalisme. Islam memiliki pengalaman

panjang bahkan menggagas lahirnya nasionalisme yang melahirkan negara-bangsa. Kedua, *perspektif universalisme*. Negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah negara-bangsa yang pertama di dunia. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi namanya pada wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun, Islam tidak memungkiri fakta bahwa setiap orang terhubung dengan negara dan tanah tumpah darah asalnya.

3.2. Nasionalisme dalam Islam

Noor Zaman dalam *“Islam and Nationalism: Contemporary Perspectives”* menjelaskan tiga istilah bahasa Arab yang biasa digunakan untuk merujuk pada konsep nasionalisme, yaitu:

a) Al-ashabiyah

Singkatnya, ashabiyah diartikan sebagai kesatuan sosial yang dibangun di atas ikatan primitif tertentu dan digunakan untuk menyatukan kelompok-kelompok di bawah payung umum yang lebih besar. Dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun menggunakan teori ashabiyah sebagai konsep utama untuk menjelaskan pembentukan peradaban hingga peradaban runtuh. Menurut Ibnu Khaldun, naik turunnya peradaban berbanding lurus dengan kuatnya koneksi ashabiyah di kelompoknya. Pada tahap awal, ketika suatu negara terbentuk, konflik dan perebutan kekuasaan terjadi antar suku dan kelompok. Tim dengan hubungan ashabiyah yang lebih kuat akan mengalahkan tim lain dengan hubungan ashabiyah yang lebih lemah. Pada akhir fase ini, sebuah negara atau kerajaan akan berdiri melalui proses penaklukan dan penyatuan suku.

Semakin kekuatan suatu negara terbentuk, hubungan antara asabiyah secara bertahap akan melemah karena penyalahgunaan kekuasaan dan konflik internal. Kemudian, ini akan menyebabkan disintegrasi suatu negara, akhirnya punah atau jatuh ke kelompok lain. Sejarah adalah sebuah siklus yang berulang dengan berlalunya waktu pada waktu yang berbeda (Afifi & Abbas, 2023a; Ibn Khaldun, 2015; Nurdin & Abbas, 2012).

b) Al-qawmiyah

Kata qaum dan qaumiyah biasanya diartikan sebagai etnis dan kebangsaan. Hari ini orang-orang Arab menyatakan kewarganegaraan Arab mereka sebagai *Al-Qaumiyah Al-'Arabiyyah*. Sebelumnya Pusat Bahasa Arab Mesir di Mu'jam Al-Wasith menerjemahkannya sebagai "bangsa" pada tahun 1960, dengan kata "ummah". Memahami wawasan Al-Quran tentang nasionalisme dengan mengacu

pada ayat-ayat yang menggunakan kata-kata ini Kata ini juga diartikan "bangsa" dalam terjemahan Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia saat menjelaskan surat Al-Hujurat (49): 13:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

Apakah ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendukung nasionalisme karena Allah menciptakan manusia bersuku dan berbagai bangsa. Begitu banyaknya pengulangan membuktikan bahwa Al-Quran mendukung menyatakan keberagaman bangsa dan nasionalisme (Shihab, 1996) .

c) *Al-wathaniyah*.

Wathan artinya rumah, tempat lahir, garis keturunan atau kampung halaman. Oleh karena itu, meski ukhuwah wathaniyah bukan seagama atau satu suku, dia juga saudara di antara rekan-rekannya. Menurut Quraish Shihab Al-Quran menegaskan untuk memperkuat persaudaraan nasional. Al-Quran menekankan bahwa perbedaan adalah hal yang tidak dapat dihindari (Shihab, 2020). Seperti yang dijelaskan dalam bagian 48 dari "Surat Al-Maidah":

"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan". (al-Maidah 5:48)

Adanya Piagam Madinah juga mencerminkan ukhuwah wathaniyah (Shihab, 1996). Ketiga istilah diatas ini menekankan aspek nasionalisme yang berbeda, meskipun para sarjana sering menggunakannya secara bergantian dalam menjelaskan nasionalisme. Noor mengatakan bahwa Ibn Khaldun menggambarkan al-asabiyah sebagai persatuan dan kohesi sosial yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suku. Al-asabiyah berkembang menjadi qawmiyah ketika melintasi batas suku. Kemudian dalam konsep al-wathaniyah, model al-asabiyah semacam ini pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk negara-bangsa. Ia mencontohkan pembentukan negara di Palestina dan Israel serta India dan Pakistan (Ibn Khaldun, 2015).

4. Nasionalisme di Indonesia

4.1. Konsepsi Nasionalisme Soekarno

Soekarno atau Bung Karno, karena dia ingin disebut rakyat. Bung besa rini menjadi juru bicara untuk kawan, untuk orang dan untuk kesetaraan yang egaliter. Bung Karno ingin disebut "benteng rakyat Indonesia", bukan "pemimpin besar revolusi" atau "kuning" seperti yang ia lakukan saat menjadi presiden. Penghubung lidah rakyat adalah istilah serupa yang diungkapkan oleh Mao Zedong, "dari orang-orang yang diungkapkan secara sistematis dalam bahasa awam mereka". Corongnya menunjukkan bahwa itu hanyalah alat musik rakyat, penghubung antara perkataan dan hati orang (Kusman et al., 2016). Sebenarnya, hal itu tidak boleh didistorsi atau dibatasi oleh kepentingan pribadi.

Banyak orang biasanya tidak tahu banyak tentang Bung Karno, yang merupakan kesalahan pahaman yang mendasar. Misalnya, Bung Karno hanya dipahami sebagai seorang nasionalis, atau sebagai nasionalis sayap kiri. Hal ini tidak terlalu tepat, seperti yang dikatakannya sendiri, Karno (Bung Karno) adalah seorang revolusioner. Dia berkata bahwa jika anda menjadi seorang nasionalis, anda akan menjadi seorang nasionalis revolusioner. Jika percaya pada agama, maka anda adalah seorang revolusioner agama; jika anda menjadi anggota Partai Komunis, maka Anda pasti akan merevolusi secara otomatis. Revolusioner artinya orang-orang yang setia pada gagasan dan pelaksanaan revolusi, yaitu revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia sebagaimana yang dipahaminya, adalah perjuangan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dari sejak revolusi nasional sampai kepada revolusi sosialis. Kemerdekaan, dekolonisasi, baru sekedar jembatan saja, bukan tujuan akhir. Kalau orang nasionalis, maka hanya berhenti di kemerdekaan saja. Bung Karno ingin terus maju sampai mencapai tujuan sosialisme Indonesia (Kusman et al., 2016).

Soekarno dan kawan-kawannya melihat benih-benih nasionalisme, dan karena tekanan penjajah Belanda, mereka melihat kemiskinan, kebodohan dan penindasan penduduk asli. Kemudian, mereka mendirikan organisasi budaya nasionalis Indonesia. Nasionalisme budaya berarti perlu memperhatikan perbedaan latar belakang budaya Indonesia sehingga yang menjadi satu kesatuan yang mengikat mereka adalah budaya daerah, seperti nasionalisme Jawa, nasionalisme Sumatera, dll. (Fahrudin, 2020).

Pada awalnya, nasionalisme budaya adalah memperhatikan masalah ekonomi dan

ketertinggalan masyarakat adat, dan belum memasuki ranah politik. Misalnya organisasi Sarekat Dagang Islam yang hanya menekankan pada upaya peningkatan perekonomian umat khususnya umat Islam. Budi Utomo yang bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kepemudaan (Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon) juga bertujuan untuk memajukan masyarakat. kesejahteraan rakyat. Selain pengaruh pelajar Indonesia yang mengenyam pendidikan Barat, gerakan nasionalis di negara-negara Asia juga sangat mempengaruhi bangkitnya gerakan nasionalis Indonesia. Dengan cara demikian, bentuk dan tujuan nasionalisme di negara-negara Asia hampir memiliki kesamaan, dan sejalan dengan gerakan nasionalis di Indonesia. Pelajar Indonesia yang belajar di Belanda juga menularkan semangat nasionalisme kepada pelajar-pelajar Asia lainnya. Perkembangan nasionalisme Indonesia dan Belanda menunjukkan kesamaan dan tujuan yang sama (Fahrudin, 2020).

4.1.1. Pan Asianisme

Kaum nasionalis Indonesia dengan senang hati menyadari bahwa propaganda Pan-Asianisme mulai berkembang, dan didorong olehnya. Mereka tahu dan percaya bahwa Pan-Asianisme pasti bisa bertahan dan berkembang dalam gerakan nasionalisme. Karena kesatuan takdir di antara bangsa-bangsa di negara-negara Asia niscaya akan menghasilkan persatuan karakter. Nasib tak pelak melahirkan kesatuan rasa. Sama seperti saat Jepang mengalahkan musuhnya pada tahun 1905, dunia Asia menganggap beruang kutub sebagai kemenangan Asia atas Eropa. Mustafa Kemal Pasha di seluruh dunia Asia oleh kemenangan AfKarahisar (Aflun Karahisar) di medan perang (Soekarno, 1964). Kemenangan China atas pengkhianat yang ingin menelannya adalah karena sama-sama memuji kemenangan dan suka memperjuangkan keadilan dan keamanan. Nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno adalah nasionalisme yang mencerminkan sikap anti kolonialisme dan imperialisme. Penderitaan rakyat Indonesia di bawah kolonialisme menambah warna nasionalisme yang dikembangkan. Gandhi percaya bahwa "nasionalisme saya adalah untuk seluruh umat manusia" (Soekarno, 1964). Nasionalisme yang berbeda dengan nasionalisme yang berkembang di Eropa. Hal sangat tercermin dalam perkataannya:

Nasionalisme yang diperjuangkan oleh Soekarno bukanlah nasionalisme yang sempit; ia bukanlah nasionalisme yang timbul dari pada

kesombongan bangsa belaka; ia adalah nasionalisme yang lebar, nasionalisme yang timbul dari pada pengetahuan atas susunan dunia dan riwayat; ia bukanlah "jingo-nationalism" atau chauvinism, dan bukanlah tiruan dari pada nasionalisme Barat. Nasionalisme ini ialah yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bukti. Nasionalisme ini ialah nasionalisme yang di dalam kelebaran dan keluasannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa, sebagai lebar dan luasnya udara, yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.

Nasionalisme yang dimaksud Soekarno adalah nasionalisme Timur, bukan nasionalisme Barat, menurut CR Das, itu adalah "*semacam nasionalisme ofensif, semacam nasionalisme yang mengejar kebutuhan sendiri, dan semacam perdagangan yang menghitung untung rugi. Nasionalisme*". Nasionalisme ini berarti menjadikan kita "alat Tuhan" dan menjadikan kita "hidup di dalam Roh Kudus", seperti yang diceritakan oleh pemimpin besar India Bipin Chandra Pal (Bipin Chandra Pal) (Soekarno, 1964). Nasionalisme yang dimaksud Soekarno adalah nasionalisme aktif, nasionalisme kreatif, nasionalisme mapan, nasionalisme kreasi dan pemujaan". Sekarang nasionalisme aktif telah dihidupkan, dapat dilindungi, jangan sampai nasionalisme menjadi nasionalisme. Benci bangsa negara lain yaitu jangan biarkan nasionalisme menjadi nasionalisme negara lain, yaitu jangan biarkan nasionalisme menjadi nasionalisme chauvinistik atau nasionalisme yang menyerang atau ofensif (Soekarno, 1964).

Soekarno menyebut nasionalisme Indonesia sebagai nasionalisme Timur. Soekarno mengakui bahwa gerakan nasionalis Indonesia "terinspirasi dari gerakan Asia lainnya".

. . . Benih yang ditanam Mahatma Gandhi di tepi Sungai Gangga tidak tumbuh di sana, tetapi separuhnya telah diterbangkan ke ekuator oleh angin, dan disambut serta ditanam oleh perbukitan Barisan yang melintasi kepulauan Indonesia (Soekarno, 1964).

Dalam kata-katanya, jelas terlihat bahwa gerakan nasionalis di Indonesia diilhami oleh gerakan nasionalis di negara-negara Timur. Yang ia kembangkan di Indonesia adalah nasionalisme Timur, dan Sukarno mengembangkan konsep nasionalisme tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia.

4.1.2. *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme*

Pada tahun 1926, Soekarno menulis artikel berjudul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” dalam *Suluh Indonesia Muda*. Soekarno berharap ketiga konsep tersebut bisa terintegrasi. Artikel ini ditulis untuk semua orang agar dapat memahami nasionalisme yang sedang berkembang. Bagi Soekarno, nasionalisme pada dasarnya meliputi prinsip kemanusiaan, cinta tanah berdasarkan ilmu, bukan chauvinisme. Sukarno meyakini bahwa Marxisme mencakup asas persahabatan dan dukungan, anti kapitalisme dan imperialisisme. Pada saat yang sama, meskipun Islam menganut doktrin non-nasionalisme, Islam tidak memusuhi atau menentang nasionalisme, dan pada dasarnya adalah sosialis..

Soekarno meyakini bahwa ketiga hal tersebut merupakan realitas yang ada saat itu. Ia percaya bahwa nasionalisme, marxisme dan islamisme-lah yang telah memberikan kehidupan dan semangat bagi pergerakan di Indonesia dan bahkan di Asia. Karyanya menjadi bentuk embrio dari konsep nasionalismenya. Ketika ketiga faksi bersatu, Sukarno tidak ingin kaum nasionalis menjadi Islamis dan Marxis, begitu pula Marxis menjadi nasionalis dan Islamis. Kesatuan antara tiga kelompok. Onghokham menyebut persatuan tiga sekolah besar sebagai konsep nasionalisme Soekarno (Yatim, 1999).

4.1.3. *Nasionalisme Kebangsaan*

Dalam nasionalisme kebangsaan pada intinya konsep nasionalisme mengesampingkan semua kepentingan partai politik yang tidak memiliki keinginan untuk menyatu dengan rakyat. Nasionalisme mereduksi semua kelompok yang tidak merasa “satu bangsa, satu bangsa” dengan rakyat; meskipun kebangsaan pada prinsipnya menolak semua kepentingan partai. Ciri-ciri "datang dari persatuan kehidupan rakyat", tetapi jangan lupa bahwa orang-orang yang menjalankan gerakan Islam dan Marxis di Indonesia dan mereka yang mempraktikkan nasionalisme semuanya memiliki “keinginan untuk hidup bersama”. Semua partai dalam gerakan kita, termasuk nasionalis dan Islamis, dan Marxis, telah menjadi "kesatuan benda" selama ratusan tahun, dan nasib kebersamaan selama ratusan tahun bukanlah kemerdekaan. Kita tidak boleh mengabaikan kecerobohan, terutama “kesatuan benda” dari kesatuan takdir membangkitkan perasaan “memiliki” orang. Bentuk kasih sayang kelompok ini tetap membuka peluang terjadinya perselisihan antar sesama. Sampai sekarang (Soekarno, 2015),

Tidak pernah ada persahabatan yang betul-betul kuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan ini di Indonesia, selain karena kesamaan cita-cita dan tujuan.

4.1.4. *Nasionalisme Islamisme, ke-Islam-an*

Jamaluddin Al-Afghani tidak sendirian dalam menanam benih nasionalisme dan cinta tanah air. Arabi Pasha, Mustafa Kemal dan Muhammad Farid Bey, Ali Pasha, Ahmed Muhammad Ali dan Shaukat Ali, mereka berdua adalah komandan yang mengajarkan cinta pada bangsa dan mereka. Mereka adalah propagandis nasionalis di negaranya masing-masing. Para pemimpin-pemimpin ini menjadi teladan bagi pergerakan Islamis, yang "fanatik", berpikiran sempit, dan tidak mau tahu bahwa mereka memiliki kewajiban untuk bersatu dengan gerakan nasionalis di negara mereka. Demikian pula, kita dapat mendiskusikan Islamis dengan Marxis, bahkan jika deskripsi kedua partai tersebut pada dasarnya berbeda (Soekarno, 2015).

4.1.5. *Marxisme*

Strategi Marxis baru tidak mengecualikan upaya bersama dengan kaum nasionalis dan Islamis Asia. Faktanya, strategi Marxis yang baru adalah dasar dari gerakan Islam dan nasionalis yang sejati. Kaum Marxis yang masih memusuhi nasionalisme Asia dan kekerasan Islam, kaum Marxis ini tidak mengikuti trend zaman dan tidak memahami strategi perubahan Marxisme (Soekarno, 2015). Di sisi lain, kaum nasionalis dan Islamis mendemonstrasikan bencana dan kelaparan yang disebabkan oleh “praktek” Marxisme, menunjukkan bahwa mereka tidak memahami Marxisme dan tidak memahami Marxisme karena kesalahan-kesalahan sebelumnya. Bukankah Marxisme itu sendiri karena sosialisme dapat benar-benar terwujud hanya jika semua negara besar adalah “sosialis” (Soekarno, 2015).

4.2. *Orde Lama*

Pada masa Revolusi, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Saat itu berbagai kendala datang dari parpol asing dan negara Indonesia sendiri. Indonesia yang baru saja merdeka berusaha mempertahankan dan mempertahankan keinginan untuk tidak dikuasai oleh negara asing. Jargon politik mulai berkembang yang mengubah mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai kesulitan. Rakyat mulai memandang revolusi sebagai perlawanan terhadap kolonialisme asing. Revolusi dan nasionalisme bergema satu

sama lain dan mengorbankan semangat mempertahankan dan memulihkan kebebasan nasional oleh negara itu sendiri. Di penghujung 1950-an, Indonesia berhasil menyingkirkan kishuf perjuangan nasional dan asing dan berhasil mendeklarasikan negara sebagai pilar penting tujuan dari revolusi.

Walaupun terkesan memiliki tujuan sama yang saling tolong menolong, namun kita tahu terdapat perbedaan politik antara Soekarno dan Hatta. Karena perbedaan cara membangun negara, Hatta dengan tenang berharap bisa secara bertahap mengedukasi masyarakat tentang politik dan membangun perekonomian rakyat melalui pinjaman terbatas. Di sisi lain, Soekarno menggunakan slogan-slogan revolusioner yang belum usai, sehingga pada hakikatnya nasionalisme masih memerangi kolonialisme, liberalisme dan imperialisme. Puncaknya pada tanggal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena konsep pembangunan bangsa antara kedua tokoh tersebut semakin berbeda, bahkan Hatta merasa Soekarno sedang menuju sebagai seorang penguasa (Noer, 2012).

Pada awal orde lama, negara Indonesia yang memahami bahwa revolusi belum usai, maka ide-ide menghapuskan penjajahan dan imperialisme asing, dalam hal ini Amerika Serikat dan Eropa masih menjadi topik yang hangat. Kebijakan pemerintah Indonesia pada saat itu lebih mengarah pada kebijakan politik menghadapi kedua kekuatan asing tersebut. Pada masa pemerintahan orde lama lahir kebijakan politik nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme). Ketiga pilar kekuasaan politik ini diyakini dapat mempersatukan seluruh negeri dan melawan pengaruh imperialisme Barat. Pandangan Soekarno tentang revolusi belum usai yang kemudian menyeret Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia yang dianggap masih bagian dan dibawah pemerintahan imperialisme Inggris.

Slogan revolusi yang didengungkan belum selesai, dan bertransformasi politik ideologis yang kemudian mengarah pada demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah kombinasi demokrasi barat dan sistem feodal Timur. Berbagai pandangan tentang konsep pembinaan demokrasi tidak dapat menyelesaikan masalah mendasar lainnya, yaitu kehidupan ekonomi negara. Konsep nasionalisme yang berkaitan dengan revolusi belum sepenuhnya mengalami perubahan maknanya. Pasalnya, situasi ekonomi dan politik dalam negeri tidak terkendali secara berimbang. Tekanan dari dunia internasional khususnya sekutu yang tidak suka dengan

kemerdekaan Indonesia juga menjadi faktor yang krusial. Tantangan konflik ideologi semakin besar, karena bukan hanya masalah imperialisme dan kolonialisme, tetapi juga masalah ideologis lainnya yaitu komunisme yang dinilai juga telah menggerogoti kewenangan pemerintahan. Kondisi ekonomi yang memburuk dan konflik ideologi ini semakin menjadi kompleks dan menjerumuskan Indonesia ke dalam tragedi 30 September 1965 yang mengakhiri kekuasaan dan kekuatan orde lama serta melahirkan pemerintahan baru yang kemudian disebut orde baru.

4.3. Orde Baru

Karena konflik ideologis yang melibatkan seluruh elemen bangsa sehingga jika hampir saja menghancurkan republik yang baru memperoleh kemerdekaannya. Krisis yang terjadi mengakhiri Orde lama sehingga munculnya Orde Baru memberikan angin segar dan solusi atas konflik yang terjadi. Konflik ideologis yang menimbulkan konfrontasi frontal dan kekerasan melumpuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang etis dan produktif. Untuk mengatasi persoalan bangsa yang kompleks, pemerintahan yang baru berusaha membangun persatuan nasional dengan mengurangi potensi-potensi konflik khususnya politik nasional. Salah satu kebijakannya adalah tidak membiarkan gagasan komunis berkembang di Indonesia (Thung et al., 2011).

Hegemoni pemerintahan atas kehidupan politik rakyat sangatlah kuat, sehingga nasionalisme yang terbentuk menjadi yang dipimpin oleh negara, seolah-olah bukan oleh warga negara. Melalui pembinaan dan pengamalan Pancasila, rasa kebangsaan dapat ditumbuhkan. Pemimpin-pemimpin baru harus menunjukkan kesetiaan kepada negara dan bangsa tanpa terlarut banyak berdebat dan menimbulkan konflik.

Nasionalisme di era orde baru cenderung berorientasi pada negara, namun karena negara memiliki kekuatan kontrol utama, seolah tidak memberikan ruang bebas bagi kebebasan berbicara. Nasionalisme lebih cenderung pada kepatuhan pada pejabat, birokrat, dan atasan yang dilandasi oleh integritas nasional. Dalam waktu sekitar 30 tahun, orde baru berkuasa, korupsi, nepotisme, kebebasan berbicara dan perbedaan sosial yang lebih luas membuat sebagian besar orang Indonesia yang memahami cara demokratis berbangsa dan bernegara tidak puas.

Kemudian pada tahun 1998, disaat terjadi krisis ekonomi Asia dan global, Indonesia tidak dapat

lepas dari krisis tersebut. Krisis melumpuhkan hubungan ekonomi pemerintah Indonesia dan menyebabkan inflasi tinggi. Orang-orang yang tidak puas dengan kendala kebebasan politik diganggu oleh penurunan tajam dalam kondisi ekonomi, telah menyebabkan demonstrasi nasional yang didorong oleh mahasiswa di semua kelas atau kelas sosial. Demonstrasi nasional berhasil menggantikan sistem orde baru dengan orde reformasi (Thung et al., 2011).

4.4. Era Reformasi

Nasionalisme di era reformasi menghadapi tantangan yang berbeda dengan di masa lalu, ketika masalah yang dihadapi negara semakin kompleks. Apalagi saat ini, era teknologi dan perangkat telah semakin dominan juga di dunia maya. Berita yang dapat diakses, semakin banyak pertemanan virtual, berita yang mudah diakses, dan sistem ekonomi digital yang semakin solid mengharuskan orang Indonesia untuk melek teknologi. Generasi muda Indonesia saat ini mungkin mengalami pergeseran konsep diri tentang komunitas imajiner. Seiring dengan peningkatan konektivitas teknologi, konektivitas antara rasa dan kebangsaan cenderung meluas. Kemajuan teknologi dunia harus diimbangi dengan nasionalisme agar tidak terjerumus pada kemerosotan nasionalisme itu sendiri (Handayani, 2019; Oktavia, Afifi, Eliza, & Abbas, 2023).

Cendekiawan Muslim lain yang mewarisi tradisi sekularisme politik Soekarno adalah Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Politik sekularisme Gus Dur perlu ditekankan, karena selain pemikirannya yang "unik", tokoh tersebut saat ini adalah politikus yang berprestasi. Gus Dur juga merupakan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terkemuka di Indonesia. Gus Dur dengan tegas menyangkal peran formal Islam dalam kehidupan berbangsa atau formalisasi apapun. Negara Islam telah menunjukkan potensi untuk menghancurkan Indonesia menjadi beberapa bagian (disintegrasi negara). Ia dengan tegas menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara sekuler yang tidak berdasarkan agama. Sekalipun Islam hanya menjadi landasan moral kehidupan politik negara, itu melengkapi Pancasila (Afifi & Abbas, 2023a; Fitri et al., 2022; Suhelmi, 1999).

Paska reformasi, hubungan umat Islam dan pemerintahan SBY juga berjalan mulus. Tidak ada yang menyangkal bahwa SBY adalah seorang nasionalis religius. Ia mengatakan bahwa identitas Islam mengacu pada proyeksi batin negara Indonesia. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (Marty Natalegawa) pada forum

utama ekonomi dunia Kelompok 20 (G20). Sebagai kelanjutannya, Indonesia terus bekerja keras untuk menggunakan Islam moderat sebagai citranya dalam politik global. Berbagai program telah dijalankan secara konsisten, antara lain dialog antar agama, antar peradaban, dan penyelenggaraan konferensi internasional cendekiawan Islam yang bertujuan untuk mempromosikan aspek moderat peradaban Islam (Ilmi, 2020). Walaupun begitu tekanan global atas kampanye terorisme dan ekstrimis agama juga muncul pada masa pemerintahan SBY.

Ahli waris sekularisme Soekarno lainnya adalah pendukung partai sekuler, seperti Megawati Soekarno Putri, yang kini memimpin PDI-P (PDI-P). Dari segi ideologis, Megawati adalah "Soekarno sejati". Dalam terminologi Yusril Ihza Mahendra (Ketua Partai Bulan Bintang), Megawati adalah seorang sekularis nasionalis fundamentalis. Ide politik Megawati tidak jauh berbeda dengan sekularisme Soekarno. Ini mudah dipahami, karena gagasan Megawati bukan lagi tiruan sekularisme Soekarno. Di mata pendukungnya, Megawati (Megawati) juga dianggap sebagai jelmaan dari Soekarno, mewarisi cita-cita perjuangan dan mewarisi "darah biru" proklamator RI (Ilmi, 2020).

Pewaris Soekarno selanjutnya adalah Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi. Jokowi mendukung agenda liberal dengan membuka seluas-luasnya ruang agenda kapitalis berkedok penanaman modal asing. Jenis penanaman modal asing ini disebut investasi dan utang. Tujuannya agar Indonesia menjadi negara sekuler. Oleh karena itu, masalah aktifisme dapat dengan jelas ditemukan dalam fragmen-fragmen agenda kepentingan liberalisme, dan sampai batas tertentu, ditujukan pada rencana sekulerisasi Indonesia. Fragmen agenda liberal dapat diketahui publik melalui provokasi pemerintah Jokowi dan konflik antara Pancasila dan Islam. Sehingga dalam pemerintahan Jokowi nampak jelas bagaimana ruang politik Islam dibatasi yang juga memiliki keragaman, tetapi juga difasilitasi secara terbatas kepada ormas-ormas yang terbatas.

Masalah radikalisme kemudian muncul dari pandangan sesat tentang ketidaksesuaian antara Pancasila dan Islam, serta dengan memperkenalkan ulang mengklasifikasikan simbol-simbol Islam sebagai radikalisme. Pada periode kedua, narasi pemerintahan Jokowi lebih nampak jelas, menggunakan narasi radikal dengan mengarahkan tuduhan kepada kelompok (negara) Islam yang terlibat dalam aktifitas politik. Politik Islam dicap sebagai mereka yang mendukung gerakan formalis dan asimilasi Islam di Tanah Air, dan dituduh

sebagai Islam radikal. Seperti yang diungkapkan Oliver Roy dalam bukunya “The Failure of Political Islam”, ia menggunakan politik Islam sebagai istilah untuk Islamisme (Roy, 1996).

5. Kesimpulan

Pengaruh konsep nasionalisme Soekarno terhadap politik ketatanegaraan di Indonesia politik Islam adalah bahwa Soekarno memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan memberikan pondasi, serta mengimplementasikan visi nasionalisme yang kuat di Indonesia. Konsep nasionalisme Soekarno menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta semangat kebangsaan dalam mencapai kemerdekaan dan pembangunan negara, dengan segala keragaman suku bangsa, adat lokal dan juga pandangan keagamaan yang bervariasi,

Pemikiran Soekarno mengenai politik ketatanegaraan cenderung mencakup aspek-aspek

kebijakan politik dan pemerintahan yang mendukung visi nasionalisme dan kepemimpinan kuat dalam memajukan Indonesia sebagai bangsa merdeka. Ia juga berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan nasionalisme untuk membentuk identitas nasional yang kuat.

Konsep nasionalisme Soekarno, meskipun tidak eksplisit berlandaskan pada hukum Islam (fiqh) yang formal, tetapi mampu memberikan landasan ideologis yang kuat bagi negara dan bangsa Indonesia, dengan menitikberatkan pada semangat persatuan, kemandirian, dan kepemimpinan yang kuat. Meskipun tidak sepenuhnya didasarkan pada fiqh siyasah, pandangan politik Soekarno memiliki pengaruh besar dalam membentuk tatanan ketatanegaraan dan politik Islam di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun identitas nasional yang kuat dan mencapai cita-cita kemerdekaan dan kemajuan bangsa.

Referensi

- Abbas, A. F. (1981). *Fikih Dan Perubahan Sosial: Sebuah Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Fikih Islam*. IAIN Syarif Hidayatullah.
- Abbas, A. F. (2010). *Metode Penelitian, cet. I*. Jakarta: Adelina Bersaudara.
- Abbas, A. F. (2020). Sumatera Thawalib. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 1*, 13–20.
- Abbas, A. F., & Afifi, A. A. (2022). Sumatera Thawalib dan Ide Pembaharuan Islam di Minangkabau. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 3*, 35–45.
- Afifi, A. A. (2021). Understanding True Religion as Ethical Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 2*, 1–5.
- Afifi, A. A. (2023). Panduan Penulisan Laporan Ilmiah untuk Publikasi. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 4*, 1–11.
- Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2020). Periode Perkembangan Darulfunun El-Abbasiyah 1854-2020. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 1*, 1–12.
- Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2023a). Islam, Wacana Negara dan Geliat Politik di Indonesia. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks, 1*, 1–27.
- Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2023b). Worldview Islam dalam Aktualisasi Moderasi Beragama yang Berkemajuan di Era Disrupsi Digital. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies, 4*, 23–34.
- Arifin, B., & Abbas, A. F. (2007). *Masa Lampau Yang Belum Selesai: Percikan Pikiran Tentang Hukum & Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII : Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Kencana.
- Dault, A. (2005). *Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fahrudin, A. (2020). *Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufasssir Jawa*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Fitri, D. R., Afifi, A. A., & Abbas, A. F. (2022). *Pemikiran Neo-modernisme dalam Hubungan Agama dan Negara di Indonesia : Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid*. 3, 1–9.
- Handayani, S. A. (2019). Nasionalisme Dalam Perubahan Di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi. *Historia, 1*(2), 154–170.

- Hasyim, A. W., & Haryono, P. (2019). Jamiat Kheir dan Al-Irsyad: Kajian Komunitas Arab dalam Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad XX di Jakarta. *Buletin Al-Turas*, 25(2), 163–176. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.12798>
- Ibn Khaldun. (2015). *The Muqaddimah* (N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press.
- Ilmi, N. (2020). *Relasi Islam Dan Politik Era Pemerintahan SBY (Studi Terhadap Produk Perundang-Undangan Bernuansa Syariah Periode 2004-2014)*. UIN Sumatera Utara.
- Jumanda, A., Yufriadi, F., Ramadhan Fitri, D., & Refliandi, I. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Menurut Tinjauan Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Nagari Tikau Selatan Kabupaten Agam). *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4(2023), 35–44. <https://doi.org/10.58764/j.im.2023.4.32>
- Kohns, H. (1984). *Nasionalisme Arti dan Sejarahanya*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, D., & Afifi, A. A. (2023). Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Solusi Menyikapi Politik Identitas. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 4, 13–21.
- Kusman, A. P., Hartono, R., Anderson, B., Setiawan, B., Mastono, & Lane, M. (2016). *Sukarno, Marxisme Dan Bahaya Pemfosisan*. IndoProgress.
- Munir, A., Nasution, A., Siregar, A. A., Julia, A., Karni, A., Hadisanjaya, ... Na'imah, Z. (2020). *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* (Sirajuddin, Ed.). Bengkulu: Zigie Utama.
- Noer, D. (2012). *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Nur, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press.
- Nurdin, A., & Abbas, A. F. (2012). *Sejarah Pemikiran Islam*. Jakarta: Amzah.
- Oktavia, Y., Afifi, A. A., Eliza, M., & Abbas, A. F. (2023). Pengembangan TDR-IM Sistem Informasi Manajemen Keuangan Siswa di Pondok Pesantren: Integrasi, Simplifikasi dan Digitalisasi. *Journal of Regional ...*, 1, 1–15.
- Roy, O. (1996). *Gagalnya Islam Politik*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2020). *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sjamsuddin, N. (1998). *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, A. D. (2002). *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Soekarno. (1964). *Dibawah Bendera Revolusi Jilid Pertama*. Jakarta: Panitia Penerbit DBR.
- Soekarno. (2015). *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme*. Bandung: Sega Arsy.
- Subhi, M. (2019). *Promosi Toleransi dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Suhelmi, A. (1999). *Soekarno versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati, Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.
- Thung, J.-L., Manan, M. A., Tirtosudarmo, R., Haris, S., Paeni, M., Soewarsono, ... Seda, F. S. S. E. (2011). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya: Beberapa Catatan dari Perspektif Demografi*. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Yatim, B. (1999). *Soekarno, Islam dan Nasionalisme: Rekonstruksi Pemikiran Islam-Nasionalis*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.